

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tercatat pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström, menyatakan kebijakan luar negeri “feminis” Swedia pada ranah internasional. Hal ini menjadi fenomena baru dalam hubungan internasional, karena dunia internasional masih didominasi oleh maskulinitas. Peran tradisional perempuan masih dikaitkan dengan urusan reproduksi dan rumah tangga, serta mendapat justifikasi dari konstruksi sosial bahwa perempuan identik dengan sifat emosional, lemah, serta naif (Tickner, 1992). Kebijakan luar negeri feminis milik Swedia berupaya untuk mengubah dogma masyarakat untuk tidak memarginalkan peran perempuan dalam politik global. Kemajuan dari kebijakan luar negeri Swedia yang khas feminis tidak terlepas dari peran Margot Wallström, yang mana dikenal sebagai diplomat yang memiliki masa lalu sebagai perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik. Selama lebih dari 30 tahun berada di dunia politik, Wallström seringkali menekankan baik hubungan antara partisipasi perempuan dalam politik global dan perdamaian berkelanjutan serta gagasan bahwa pemberdayaan perempuan berdampak positif pada keamanan nasional dan internasional (Aggestam & Rosamond, Repoliticising the Gender-Security Nexus: Sweden’s Feminist Foreign Policy, 2018). Terpilihnya Wallström sebagai Menteri Luar Negeri Swedia pun diikuti dengan diluncurkannya kebijakan luar negeri feminis Swedia.

Margot Wallström sebelum menjadi Menteri Luar Negeri telah banyak mengangkat isu feminisme terutama kekerasan seksual ke ranah internasional. Wallström (2012) mendeskripsikan kekerasan seksual sebagai senjata “*cheap, silent and effective*” yang digunakan oleh kelompok bersenjata dalam berbagai jenis konflik

untuk memperlakukan, meneror, dan menyingkirkan warga sipil. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa ketimpangan gender di masyarakat masih cukup tinggi. BBC (2012) menyatakan bahwa kekerasan seksual sempat marak terjadi di Swedia, yang mana sekitar 80% pelaku kekerasan tidak tersorot media. Kekerasan yang terjadi pun banyak yang diawali dengan perdagangan manusia sehingga isu tersebut menjadi salah satu permasalahan utama domestik. Meskipun laki-laki dan anak laki-laki termasuk dalam korban pelecehan seksual, perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional terpengaruh oleh kejahatan kekerasan seksual terkait konflik serta menanggung beban kekejaman tersebut. Mekanisme keadilan transisional sangat penting untuk memerangi efek negatif dari kekerasan seksual terkait konflik karena bertujuan untuk mengatasi warisan pelanggaran hak asasi manusia skala besar dan membangun perdamaian berkelanjutan melalui jaminan akuntabilitas, keadilan, dan rekonsiliasi (BBC International, 2012).

Pada tahun 2007, Wallström menjabat sebagai ketua Inisiatif Menteri Council of Women World Leaders (CWWL), yang mana ia secara aktif mempromosikan penunjukan perempuan ke posisi tanggung jawab. CWWL adalah jaringan presiden, perdana menteri, dan menteri wanita saat ini dan mantan yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengalaman demokrasi secara global dengan meningkatkan jumlah, efektivitas, dan visibilitas wanita yang memimpin pada tingkat tertinggi di negara mereka. Perempuan diberikan wadah untuk membawa sikap dan pengalaman yang berbeda ke meja perundingan dan agenda politik. Pemberdayaan dan partisipasi perempuan menjadi penting dalam menghadapi tantangan global saat ini, termasuk diantaranya perubahan iklim dan keamanan yang dinilai sangat mendesak. Selain itu, dalam kunjungannya ke Kolombia tahun 2012, Wallström bertugas sebagai Representasi Khusus Kekerasan Seksual dalam Konflik PBB, menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual yang ditargetkan oleh kelompok bersenjata yang muncul pasca-demobilisasi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan reparasi berdasarkan Undang-Undang Korban

dan Restitusi Tanah, karena pemerintah tidak menganggap kelompok ini sebagai aktor dalam konflik bersenjata (Wallström, 2012).

Upaya Wallström dalam meningkatkan peran perempuan serta mengangkat isu kekerasan seksual pada ranah internasional dan merumuskan kebijakan luar negeri feminis Swedia membuktikan bahwa feminisme menjadi karakteristik dari perilaku politik Wallström. Wallström (2010) juga memandang kesetaraan gender sebagai tujuan jangka panjang yang menjadi perhatian seluruh warga negara, tidak hanya perempuan. Konsep ketidaksetaraan gender dihasilkan dari konstruksi sosial yang dibangun di atas berbagai stereotip yang ada dalam keluarga, pendidikan, budaya, dan media, yang tercermin dalam lembaga dan majelis politik. Keterwakilan perempuan yang adil dalam politik tidak hanya menjadi perhatian perempuan. Sebaliknya, peningkatan kesetaraan gender adalah masalah demokrasi. Masyarakat atau lembaga di mana perempuan tidak terwakili secara adil menderita defisit demokrasi, karena setengah dari warganya tidak diperhitungkan dengan baik dalam debat publik dan dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan gender adalah tentang menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, dan tentang mengambil keputusan yang lebih mewakili rakyat, karena perempuan berbeda, dengan pengalaman, ide, dan sudut pandang yang berbeda. Perlu disadari bahwa tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa pemerataan pembangunan, dan tidak akan ada pembangunan yang berkeadilan tanpa kesetaraan gender (Wallström, 2010).

Pada eleksi tahun 2014, pemerintah Partai Sosial Demokrat bersama dengan Partai Hijau yang baru terpilih menyatakan bahwa mereka akan mengupayakan kebijakan luar negeri yang feminis. Pemerintahan Swedia yang baru bertujuan untuk menjadi suara terkuat dalam isu kesetaraan gender dan pekerjaan penuh hak asasi manusia untuk semua perempuan dan anak perempuan. Kebijakan luar negeri feminis Swedia merupakan indikasi jangka panjang Swedia, juga sebagai ambisi untuk menjadi kekuatan normatif dalam politik dunia dan menjadi model untuk diikuti aktor

lain. Diketahui bahwa Partai Sosial Demokrat adalah partai dari Margot Wallström, sehingga Wallström dipastikan mendapat dukungan penuh dari mayoritas parlemen di pemerintahan Swedia dalam memutuskan kebijakan luar negeri feminis Swedia dan menjadi negara pertama di dunia yang secara eksplisit memasukkan unsur feminis dalam politik luar negeri mereka. Paparan media dalam pers terkemuka juga ikut serta membantu memproyeksikan citra Swedia sebagai negara kosmopolitan yang peka gender dan efisien (Sundström & Elgström, 2018).

Selain itu, Margareta Wahlström, Presiden dari Swedish Red Cross juga mendukung keputusan pemerintah Swedia karena ia percaya bahwa kebijakan luar negeri feminis akan menyentuh sesuatu yang sangat penting (Johansson, 2018). Wahlström juga telah melihat bukti nyata bahwa KLNF yang difokuskan oleh Swedia di Dewan Keamanan PBB telah memberikan dorongan kuat untuk serius melibatkan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian. Sekretaris Jenderal dari organisasi Save The Children Sweden, Elisabeth Dahlin, ikut mendukung adanya KLNF Swedia karena dianggap sebagai langkah yang strategis, berwawasan ke depan dan dapat menjadi contoh bagi seluruh dunia (Johansson, 2018). Wahlström dan Dahlin menyatakan bahwa langkah Swedia tersebut akan membuat aktor negara maupun non-negara lainnya melihat isu gender dalam hubungan internasional dengan cara yang berbeda. Yang mana, memprovokasi beberapa pihak dan mendorong siapapun yang ingin ikut melakukan perubahan dengan mengangkat isu-isu gender ke ranah internasional dengan lebih serius.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan luar negeri feminis Swedia yang diputuskan oleh Margot Wallström untuk digunakan menjadi dasar politik luar negeri Swedia mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat domestik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial dan politik apa yang memungkinkan adanya dukungan signifikan dari parlemen pemerintah Swedia dan organisasi non-pemerintah terhadap kebijakan luar negeri feminis Swedia yang diputuskan oleh Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström.

1.4 Kerangka Teori

Untuk menganalisis alasan yang mendasari dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri feminis oleh Margot Wallström, penulis menggunakan dua kerangka pemikiran guna membantu menjelaskannya.

1.4.1 Popularitas Agenda Kesetaraan Gender di Masyarakat Demokratis

Kesetaraan gender telah mendapatkan tempat sentral dalam agenda politik global selama tiga puluh tahun terakhir, yang mana secara luas dianggap sebagai cita-cita positif dan pengejarannya digambarkan sebagai persyaratan inti keadilan sosial. Kesetaraan gender semakin dibingkai sebagai pusat realisasi modernisasi dan efisiensi ekonomi, dan pencapaiannya disajikan sebagai kunci dari pemerintahan yang baik (Squires, 2007). Disisi lain, kesetaraan gender juga menjadi masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat demokratis, terutama dalam bidang politik (Norris & Inglehart, 2001). Literatur ilmu politik ortodoks tentang demokratisasi sejauh ini hanya sedikit menyebutkan gender, khususnya perempuan, meskipun ada bukti peran signifikan yang dimainkan perempuan dan gerakan perempuan (Waylen, 1994). International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyebutkan bahwa proses dan institusi pembangunan demokrasi akan tetap parsial dan cacat jika terus memarjinalkan perempuan beserta kelompok rentan lainnya sebagai protagonis maupun sebagai penerima manfaat dari perubahan demokrasi. Argumen tersebut didukung oleh Moghadam (2004 dalam (Rizzo, Abdel-Latif, & Meyer, 2007) bahwa kualitas demokrasi ditentukan tidak hanya oleh bentuk lembaga,

tetapi juga oleh sejauh mana kelompok-kelompok sosial yang berbeda berpartisipasi dalam lembaga-lembaga tersebut. Dalam hal ini, demokrasi gender sangat penting, yang mana ketiadaan perempuan dalam kehidupan politik mengakibatkan demokratisasi berwajah laki-laki sehingga menjadi sebuah bentuk demokrasi yang tidak lengkap dan sangat bias. Pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, secara tidak langsung mengangkat isu kesetaraan gender yang mana menyetujui bahwa perempuan perlu terlibat dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan agar kelestarian lingkungan dapat tercapai. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi persetujuan terkait keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: (1) perempuan lebih berpotensi terkena dampak negatif lingkungan daripada laki-laki, karena posisi sosial dan ekonomi perempuan relatif buruk berkaitan dengan peran domestik perempuan; (2) perempuan lebih mungkin memiliki pengetahuan yang lebih baik, dan kedekatan dengan lingkungan, karena perempuan lebih mungkin lebih mungkin berperan menjadi penyedia makanan utama, penjaga makanan utama, serta produsen makanan dominan (Buckingham-Hatfield, 2002).

Dari semua kesepakatan yang dicapai pada Konferensi PBB Rio, Agenda 21 paling menonjol membahas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Bab 24 secara khusus membahas apa yang perlu dicapai untuk memungkinkan perempuan berperan penuh dalam pengambilan keputusan lingkungan dan untuk menghapus ketidaksetaraan, khususnya yang berkaitan dengan status hukum dan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana. Namun, masih sangat sulit untuk menegakkan dan memantau kesepakatan yang berkaitan dengan kesetaraan gender (Buckingham, 2002). Kebutuhan untuk mengatasi pola eksklusi, hambatan struktural, stereotip dan relasi hubungan yang tidak setara dalam masyarakat adalah keharusan demokratis yang tidak dapat terlalu difokuskan. Lembaga dan proses demokrasi yang inklusif dan akuntabel hanya mungkin terjadi apabila kesetaraan

gender dan inklusi kelompok terpinggirkan dalam proses demokrasi tercapai (International Institute for Democracy and Electoral Assistance).

Susan Markham dan Stephenie Foster (2021) dalam portal *online* Just Security menyebutkan bahwa kesetaraan gender memperkuat demokrasi. Penelitian dan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa lembaga demokrasi seperti kementerian pemerintah, badan pengambil keputusan terpilih, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil lebih kuat dengan kesetaraan gender. Semua harus menyertakan suara perempuan (Markham & Foster, 2021). Isu gender menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan demokratisasi itu sendiri. Pada pertemuan Commission on the Status of Women (CSW) PBB pada Maret 2021, Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, menekankan hubungan kunci antara kepemimpinan perempuan dan pemerintahan demokratis yang kuat: “Status perempuan adalah status demokrasi. Status demokrasi juga secara fundamental tergantung pada pemberdayaan perempuan, bukan hanya karena pengucilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan penanda demokrasi yang cacat, tetapi karena partisipasi perempuan memperkuat demokrasi.” (Just Security, 2021).

Partisipasi politik perempuan menghasilkan keuntungan nyata bagi demokrasi, termasuk responsivitas yang lebih besar terhadap kebutuhan warga negara dan peningkatan kerja sama lintas partai dan garis etnis. Negara-negara dengan nilai tinggi pada hak-hak sipil dan kebebasan politik memiliki proporsi perempuan yang lebih tinggi di legislatif nasional daripada negara-negara dengan nilai rendah. Perempuan cenderung bekerja dengan cara yang tidak terlalu hierarki, lebih partisipatif, dan lebih kolaboratif. Secara global, anggota parlemen perempuan dianggap lebih jujur dan responsif daripada laki-laki, kualitas yang mendorong kepercayaan pada institusi meningkat (Markham & Foster, 2021).

1.4.2 Perubahan Sosial yang Mendorong Agenda Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Demokratis

Partisipasi perempuan dalam ranah politik telah memengaruhi agenda kesetaraan gender secara langsung maupun tidak langsung. Analisis gender dan feminis mengungkapkan bahwa negara dalam hampir semua kasus didominasi laki-laki, dan dalam cara yang berbeda merupakan konstruksi maskulinis. Tidak mungkin menjelaskan kekuasaan negara tanpa menjelaskan pengucilan sistematis perempuan (Runyan & Peterson, 1991). Para feminis kemudian menyuarakan keinginan mereka agar diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai warga negara.

Pada abad ke-19, para feminis di negara demokrasi liberal mengkampanyekan hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan, berkonsentrasi pada kesetaraan formal di depan hukum. Namun, upaya tersebut gagal sehingga feminis beralih pada isu perempuan dalam bidang perdamaian dan ekologi. Pada 1980-an feminis kembali menjadi lebih terpusat pada politik arus utama, bekerja untuk meningkatkan peran perempuan dalam ranah politik, serta mengejar kebijakan demi kepentingan perempuan. Berlanjut hingga tahun 1990-an, isu perempuan diperkenalkan dalam agenda berbagai kelompok sosial dan politik (Banaszak, Beckwith, & Rucht, 2003). Secara bertahap aktivis feminis mengadopsi sikap yang lebih berorientasi pada negara, dan bentuk keterlibatan politik yang diadopsi oleh para pendukung kesetaraan gender bergeser dari kelompok otonom yang separatis ke keterlibatan yang lebih besar dengan negara. Kesetaraan gender dewasa ini semakin dianggap sebagai arus utama, yang diadopsi sebagai aspek sentral dari wacana demokrasi liberal dan dianut oleh organisasi internasional terkemuka dan pemerintah nasional di seluruh dunia (Squires, 2007).

Upaya feminis dalam memberdayakan perempuan dalam ranah politik diawali dengan kritik mereka terhadap bagaimana ‘politik tubuh’ dikaitkan dengan tubuh laki-laki, dan mengapa perempuan merasa begitu sulit untuk menjadi warga negara dari negara mereka sendiri. Seperti yang diketahui bahwa keadaan perang, masalah militer dan keamanannya merupakan tantangan terbesar tidak hanya bagi laki-laki

tetapi juga untuk perempuan (Tickner, 1992). Dengan berkurangnya peran negara dalam hubungan internasional, Peterson (1995) melihat negara, kedaulatan, dan Hubungan Internasional membutuhkan pemikiran, dengan cara yang menganggap serius dinamika global dan hubungan gender.

Squires (2007) menyatakan bahwa terdapat beragam penjelasan yang menjadi alasan mengapa pendekatan feminis harus meningkat di beberapa tahun terakhir, paling signifikan diantaranya adalah pembangunan ekonomi, struktur peluang politik dan perubahan ide. Argumen pembangunan ekonomi menyoroti sejauh mana industrialisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan kelas menengah terdidik berkorelasi dengan peningkatan aktivisme feminis. Matland (1998) melihat pendidikan yang tinggi dan partisipasi angkatan kerja umumnya disertai dengan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Di negara-negara maju, pergeseran dari proses produksi Fordisme ke neoliberal telah memengaruhi tingkat partisipasi politik. Pada tatanan gender Fordis yang mensyaratkan produksi massal dan kelas pekerja yang stabil, didukung oleh pencari nafkah laki-laki dan pekerja rumah tangga perempuan yang tidak dibayar, pengabaian kebijakan Keynesian menyebabkan pengurangan layanan kesejahteraan sosial yang mempertahankan model pencari nafkah laki-laki. Kemudian banyak perempuan yang didorong ke pasar tenaga kerja karena kebutuhan ekonomi, yang menandakan pergeseran dalam rezim gender dari yang didasarkan pada kurungan domestik perempuan yang mana perempuan diperbolehkan hadir di ruang publik (McDowell, 1991). Hal ini menjadi perubahan yang cukup signifikan, karena mengacu pada teori politik barat yang melihat konstruksi ruang publik sebagai laki-laki. Politik sendiri melibatkan kinerja dan penampilan di ruang publik. Sedangkan perempuan dan anak-anak berada di ruang pribadi rumah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional laki-laki, sehingga laki-laki dibebaskan untuk melakukan tugas publik dan warga negara mereka (Pettman, 1996).

Proses restrukturisasi tersebut telah memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan kelas menengah ke pasar tenaga kerja dan jabatan publik. Pertumbuhan keseluruhan dalam pekerjaan perempuan mengintensifkan tuntutan perempuan pada negara mengingat bahwa prioritas kebijakan perempuan dalam pekerjaan yang dibayar berfokus pada penyediaan layanan publik, dan menyebabkan peningkatan partisipasi publik perempuan dalam lembaga pemerintahan (Squires, 2007). Pengorganisasian feminis pun dianggap penting sebagai penggerak perubahan, dan aksi kolektif sebagai tandingan dari program pemberdayaan neoliberal yang ditujukan untuk mengoptimalkan diri sendiri. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan pada ranah politik memberikan kesempatan yang lebih besar untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, memfokuskan kembali perhatian pada global kapitalisme dan ketidaksetaraan yang ada didalamnya (Cornwall & Rivas, 2015).

1.5 Argumen Penelitian

Merujuk kerangka pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa kebijakan luar negeri feminis Swedia didukung masyarakat Swedia karena kesetaraan gender menjadi bagian penting dari demokrasi. Demokrasi yang utuh membutuhkan partisipasi perempuan dalam aspek politik pemerintahan—termasuk pembuatan keputusan— demi kebijakan yang bermanfaat yang merata di berbagai kalangan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Rentang waktu penelitian adalah sejak munculnya diskursus kesetaraan gender di Swedia pada abad ke-19 dan perkembangannya, kemudian diresmikannya kebijakan luar negeri feminis Swedia pada tahun 2014 hingga 2021 guna mendapat informasi dan berbagai perspektif terkait kebijakan feminis dan respon dari berbagai pihak domestik. Penelitian akan menggunakan area geografi Swedia dengan hanya berfokus pada masyarakat Swedia.

1.7 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif untuk menguji argumen penulis dengan mencari relasi antar variabel, yaitu kebijakan luar negeri feminis, Margot Wallström selaku Menteri Luar Negeri Swedia yang merupakan tokoh feminis, dan masyarakat demokratis. Tipe eksplanatif ini bertujuan untuk memahami fenomena dan perilaku aktor utama, serta menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena atau kasus yang diangkat.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut sendiri didapatkan melalui situs resmi pemerintah (dalam hal ini pemerintah Swedia) tersebut. Juga didapatkan sumber lain melalui sejumlah referensi yang memuat penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal dan artikel ilmiah, koran digital, serta sejumlah sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dan berpotensi menopang dalam memberi informasi pada penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Argumentasi yang diajukan dielaborasi dalam tiga bab pembahasan. Uraian tentang diskursus kesetaraan gender dan praktik emansipasi perempuan yang kuat di masyarakat Swedia akan dibahas pada Bab II. Pada Bab III akan lanjut membahas pengaruh wacana kesetaraan gender terhadap politik luar negeri Swedia. Bab IV berisi analisis relasi antara arti penting kesetaraan gender dalam kehidupan sosial dan politik Swedia dengan kebijakan luar negeri feminis. Penutup yang membahas kesimpulan penelitian dengan ini menjadi bagian dari Bab V.